



IORA: PELUANG DAN TANTANGAN EKONOMI BAGI INDONESIA

Nidya Waras Sayekti*)

Abstrak

KTT IORA (Asosiasi Negara Lingkar Samudra Hindia) yang diselenggarakan tanggal 5-7 Maret 2017 di Jakarta telah menghasilkan Jakarta Concord yang berisi tata nilai dan acuan gerak untuk mengelola kawasan Samudra Hindia sebagai wilayah yang stabil, damai, dan aman. Kondisi tersebut sangat penting untuk mengembangkan kerja sama ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Bagi Indonesia, IORA memberikan peluang dan tantangan dalam kemajuan perekonomian Indonesia. Peningkatan kerja sama perdagangan, industri, dan pariwisata serta terbukanya investasi merupakan peluang dan tantangan yang harus disambut Indonesia. Oleh karena itu, DPR melalui fungsi pengawasannya perlu memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk menindaklanjuti hasil kesepakatan dalam KTT tersebut.

Pendahuluan

Pada tanggal 5–7 Maret 2017 di Jakarta telah dilaksanakan Konferensi Tingkat Tinggi *Indian Ocean Rim Association* (IORA) atau Asosiasi Negara Lingkar Samudra Hindia ke-20 yang dihadiri oleh 21 negara anggota dan 7 negara mitra wicara. Negara anggota IORA yaitu Australia, Bangladesh, Comoros, India, Indonesia, Iran, Kenya, Madagaskar, Malaysia, Mauritius, Mozambik, Oman, Seychelles, Singapura, Afrika Selatan, Somalia, Sri Lanka, Tanzania, Thailand, Uni Emirat Arab, dan Yaman. Sedangkan tujuh negara mitra yang hadir yaitu Amerika Serikat, Inggris, Jepang, Mesir, Prancis, China, dan Jerman.

IORA merupakan organisasi intrakawasan di Samudra Hindia yang berdiri pada Maret 1997 di Mauritius. Tujuan utamanya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan seimbang bagi seluruh negara anggota dan menciptakan landasan yang kuat bagi kerja sama ekonomi regional melalui upaya-upaya fasilitas perdagangan dan menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan.

Indonesia menjadi Ketua IORA untuk periode 2015-2017 dengan mengusung tema “*Strengthening Maritime Cooperation in a Peaceful and Stable Indian Ocean*”. Dalam

*) Peneliti Muda Ekonomi Terapan pada Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI.
E-mail: nidya.ws@dpr.go.id



KTT IORA disepakati Jakarta Concord yang isinya mendorong kerja sama regional bagi Samudra Hindia yang damai, stabil, dan makmur. IORA juga mengangkat dua buah *cross cutting issues* yaitu *Blue Economy* dan *Women Empowerment*.

Dalam KTT tersebut juga diadakan *business summit* (pertemuan bisnis) dengan tema “*Building Partnership for Sustainable and Equitable Economic Growth*” (Membangun Kemitraan untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Adil). Pertemuan tersebut menghasilkan 11 poin deklarasi bersama (*joint declaration*) serta IORA *Action Plan* untuk memperkuat peran sektor swasta dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi di kawasan IORA. Sebelas poin Deklarasi Bersama IORA tersebut berisi: 1) Diversifikasi perdagangan dengan fokus UKM; 2) Mengeliminasi hambatan perdagangan; 3) Meningkatkan perdagangan langsung; 4) Menjaga iklim investasi yang lebih inklusif dan kondusif; 5) Memobilisasi investasi asing dan swasta domestik; 6) Perhatian pada ketahanan pangan, manufaktur, pembangunan infrastruktur, kerja sama maritim, pariwisata, dan akses ke pasar modal dan keuangan; 7) Mengembangkan konektivitas yang lebih baik melalui mobilisasi investasi swasta; 8) Kolaborasi di bidang edukasi, pelatihan, dan magang untuk meningkatkan keterampilan dan kewirausahaan; 9) Memberdayakan perempuan dan pengusaha muda; 10) Perbaiki kebijakan publik; dan 11) Mendorong kerja sama berdasarkan kesetaraan dan keuntungan bersama.

Menurut Shinta W. Kamdani, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Hubungan Internasional, ada tiga target yang ingin dicapai oleh seluruh anggota IORA. *Pertama*, investasi, terutama untuk UMKM guna mendorong UMKM menjadi bagian dari rantai pasok global. *Kedua*, pemberdayaan perempuan. Dan *ketiga*, pariwisata, konektivitas, dan infrastruktur.

Kesepakatan dan deklarasi bersama yang dihasilkan dalam KTT IORA ke-20 memberikan peluang dan tantangan untuk peningkatan ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, tulisan ini mencoba menganalisis peluang dan tantangan yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan perekonomian bangsa.

Peluang Peningkatan Ekonomi

Negara lingkaran Samudra Hindia memiliki potensi ekonomi yang luar biasa, yaitu: memiliki 2,7 miliar populasi penduduk atau 35 persen penduduk dunia, menguasai setengah perjalanan *container* dunia dan dua pertiga pengapalan *tanker* energi dunia, memiliki 55 persen cadangan minyak dunia dan 40 persen cadangan gas dunia, serta menghasilkan 30 persen produksi ikan tuna dunia. Selain itu, negara-negara IORA memiliki peran yang sangat penting dan strategis, terutama sebagai pendorong stabilitas ekonomi di kawasan Samudra Hindia, karena 70 persen jalur perdagangan di dunia melalui Samudra Hindia. Perdagangan intraregional IORA pada tahun 2015 mencapai 777 miliar dolar AS atau naik 300 persen dibanding tahun 1994 yang sebesar 233 miliar dolar AS.

Dalam konteks kerja sama ekonomi, IORA memiliki potensi perdagangan yang besar bagi Indonesia. Pasar ekspor Afrika mencapai 550 miliar dolar Amerika Serikat (AS) pada 2016, namun realisasi ekspor Indonesia baru mencapai 4,2 miliar dolar AS (0,76 persen). Potensi dengan pasar Timur Tengah mencapai 975 miliar dolar AS, namun Indonesia baru 5 miliar dolar AS (0,51 persen). Melalui forum kerja sama IORA ini, Indonesia bisa mengambil peluang membangun kemitraan lebih erat dengan para anggota IORA sebagai *growing partners* dan pasar ekspor nontradisional.

Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menilai bahwa peningkatan akses pasar dengan negara anggota IORA yang sebagian besar merupakan pasar nontradisional dapat dilakukan melalui kerangka kerja sama *bilateral supply chain*. Indonesia dapat menjajaki peningkatan cakupan jalinan kerja sama perdagangan bilateral dan multilateral dengan beberapa negara kunci seperti Uni Emirat Arab, Afrika Selatan, Bangladesh, Iran, Amerika Serikat, dan Inggris.

Ekspor Indonesia tahun 2016 ke negara-negara IORA mencakup sepertiga ekspor total Indonesia dan mencetak surplus 1,5 miliar dolar AS. Dampak perekonomian global dan regional tidak bisa dipisahkan dari ekonomi nasional. Rektor Universitas Paramadina, Firmanzah berpendapat bahwa Indonesia perlu membuka kemitraan di bidang perdagangan dan investasi karena hampir tak

ada negara yang bisa menyelesaikan sendiri masalah-masalah ekonomi tanpa bekerja sama dengan perusahaan swasta, lembaga asing, atau negara lain.

Head of Departement of Economics Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Indonesia, Yose Rizal Damuri juga mengatakan bahwa kemitraan atau integrasi ekonomi mampu memberikan dorongan yang besar terhadap perekonomian domestik. Survei yang dilakukan CSIS pada tahun 2013 terhadap 500 perusahaan mendapatkan jawaban positif. Ekspor Indonesia menjadi lebih baik, tidak hanya bagi perusahaan besar tetapi juga bagi usaha kecil menengah (UKM).

Menurut Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, saat ini masih ada hambatan perdagangan baik tarif maupun nontarif di kawasan negara anggota IORA, seperti hambatan ekspor RI ke kawasan negara-negara anggota IORA masih tinggi karena tidak ada perjanjian dagang di antara negara IORA. Oleh karena itu, melalui forum IORA, Indonesia dapat membuka peluang di sektor perdagangan dan industri dengan membangun kerja sama di antara negara anggota.

Di sektor industri, Indonesia memiliki peluang kerja sama pada sektor perkapalan dan peralatannya, pengolahan hasil laut, komponen otomotif, petrokimia, gasifikasi batu bara, dan produk hilir agro. Investasi industri tersebut termasuk sektor padat karya berorientasi ekspor dan substitusi impor. Beberapa upaya yang perlu dilakukan yaitu: menginisiasi pelaksanaan *business matching* dengan negara-negara IORA serta mengoptimalkan peran Kedutaan Besar Republik Indonesia dalam mempromosikan kemampuan industri dalam negeri dan potensi pasar bagi kedua belah pihak. Salah satu bentuk kerja sama yang telah dilakukan saat ini yaitu pelatihan dalam membangun kapasitas industri kecil dan menengah dengan Mozambik dan Seychelles.

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mencatat investasi negara-negara anggota IORA rata-rata naik 13,4 persen dalam lima tahun terakhir sebagaimana terlihat pada Tabel 1.

Kepala BKPM Thomas Trikasih Lembong mengatakan peningkatan tren investasi itu menunjukkan semakin berkembangnya kerja sama ekonomi di

kawasan ini. Tren positif investasi tersebut terutama disumbang oleh sektor tersier (jasa atau industri jasa). Ke depan, diharapkan kontribusi investasi dari negara-negara IORA dapat terus meningkat. Lima besar kontributor utama dari realisasi investasi yang masuk dari negara IORA adalah Singapura, Malaysia, Mauritius, Australia, dan Thailand.

Tabel 1. Tren Kenaikan Investasi Tahun 2012 – 2016

Tahun	Nilai Investasi (Miliar USD)	Pertumbuhan (%)
2012	7,5	-
2013	6,6	-12
2014	9,2	39,39
2015	9,5	3,26
2016	11,7	23,16

Sumber: BKPM, 2017.

Potensi ekonomi lainnya yang dimiliki Indonesia adalah pariwisata. Menteri Pariwisata Arief Yahya menawarkan kerja sama investasi untuk 10 destinasi wisata prioritas di Indonesia kepada para investor dari negara-negara anggota IORA, yaitu: Borobudur (Jawa Tengah), Mandalika (Nusa Tenggara Barat), Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), Bromo-Tengger-Semeru (Jawa Timur), Kepulauan Seribu (DKI Jakarta), Toba (Sumatera Utara), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), Tanjung Lesung (Banten), Morotai (Maluku Utara), dan Tanjung Kalayang (Bangka Belitung). Berdasarkan data Kementerian Pariwisata, total investasi yang dibutuhkan untuk pengembangan 10 destinasi tersebut mencapai Rp200 triliun. Dalam perencanaannya, pendanaan sebanyak Rp100 triliun bersumber dari investasi publik dan sisanya dari sektor swasta, yaitu Rp35 triliun dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), Rp8 triliun dari perbankan, dan Rp57 triliun dari Reksa Dana Penyertaan Terbatas (RDPT).

Pemerintah menargetkan kunjungan 20 juta wisatawan mancanegara pada 2019. Untuk mendukung target tersebut, pemerintah telah mengeluarkan sejumlah regulasi, antara lain memberikan bebas visa kunjungan singkat (BVKS) untuk 169 negara serta mempermudah izin masuk *yacht* dan

kapal pesiar ke dalam perairan Indonesia dengan mencabut aturan “*Clearance Approval for Indonesia Territory*” (CAIT). Sektor pariwisata juga membutuhkan konektivitas udara yang memadai, mengingat 75 persen kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia menggunakan moda transportasi udara.

Tantangan bagi Indonesia

Peluang besar yang diperoleh Indonesia dari KTT IORA ke-20 tersebut sekaligus memberikan tantangan yang segera harus diatasi, antara lain kesiapan infrastruktur logistik untuk meningkatkan daya saing. Tantangan yang nyata datang dari China, yang pada awal tahun ini meluncurkan layanan angkutan logistik kereta api antara China dan Inggris. Rute ini melintas dari Beijing, negara-negara Asia dan Eropa, dan berakhir di London. Keberadaan rel langsung dari Beijing ke London memungkinkan produsen mengeksplorasi cara-cara baru untuk menurunkan biaya logistik.

Tantangan lain juga datang dari Thailand melalui pembangunan Terusan Thailand (Kra Kanal). Dalam artikel yang ditulis wartawan senior *the Straits Times* Cheong Suk-Wai pada April 2016, mengacu pada buku pemikir Singapura Prag Khanna yang memuat *Khanna Connectography*, kanal tersebut akan menghubungkan Samudra Hindia dan Laut China Selatan langsung tanpa melewati Singapura. Kanal ini akan menjadi alternatif logis bagi pihak-pihak yang ingin menghindari Selat Malaka.

Melihat tantangan dari dua negara tersebut, maka Indonesia sebagai negara kepulauan harus mempercepat penyelesaian pembangunan infrastruktur konektivitas yang telah menjadi program prioritas pembangunan nasional. Pembangunan infrastruktur konektivitas akan menghubungkan setiap kawasan di Indonesia sehingga biaya perdagangan akan menjadi lebih murah dan menjadi stimulus kegiatan ekonomi lainnya. Hal ini akan berdampak positif terhadap perkembangan investasi dan industri yang lebih merata.

Penutup

KTT IORA ke-20 memberikan peluang yang sangat besar bagi peningkatan ekonomi Indonesia, antara lain peningkatan

perdagangan, industri dan pariwisata, serta terbukanya investasi. Namun demikian, peluang tersebut masih menyisakan pekerjaan baru bagi pemerintah, yaitu menindaklanjuti kesepakatan dan kerja sama yang telah dibuat dengan negara-negara anggota IORA. Pemerintah harus dapat mengantisipasi tantangan daya saing melalui percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas sehingga dapat menurunkan biaya logistik.

Bagi DPR, kebijakan pemerintah tersebut perlu dibahas dalam rapat-rapat kerja melalui pelaksanaan fungsi pengawasan. DPR perlu memantau serta mengevaluasi pelaksanaan kebijakan yang diambil pemerintah dalam rangka menindaklanjuti KTT IORA ke-20 tersebut, seperti pelaksanaan perjanjian kerja sama bilateral atau multilateral dengan negara-negara anggota IORA di bidang ekonomi dan investasi dengan para pelaku usaha.

Referensi

- “Acuan Kemajuan Kawasan Disepakati”, *Kompas*, 8 Maret 2017, hal. 1 dan 15.
- “Apa Untungnya KTT IORA 2017 bagi Indonesia?”, <https://kumparan.com/wiji-nurhayat/apa-untungnya-ktt-iora-2017-bagi-indonesia>, diakses 8 Maret 2017.
- “Darmin Sebut IORA Belum Dimanfaatkan Maksimal”, <https://www.komoditas.co.id/darmin-sebut-iora-belum-dimanfaatkan-maksimal/>, diakses 6 Maret 2017.
- “IndianOceanRim Association”, <http://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-regional/Pages/IORA.aspx>, diakses 7 Maret 2017.
- “Investasi Negara IORA Rp155T”, *Republika*, 7 Maret 2017, hal. 16.
- “IORA Business Summit Hadirkan Produk Indonesia”, <http://www.neraca.co.id/article/82019/iora-business-summit-hadirkan-produk-indonesia>, diakses 7 Maret 2017.
- “Kompak di Samudra Hindia”, *Bisnis Indonesia*, 7 Maret 2017, hal. 1.
- “Pasar IORA Belum Dimanfaatkan Secara Maksimal”, *Harian Ekonomi Neraca*, 7 Maret 2017, hal. 6.
- “Samudra Hindia Jadi Poros”, *Kompas*, 8 Maret 2017, hal. 8.
- “Tantangan IORA adalah China”, *Republika*, 7 Maret 2017, hal. 9.